

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan dan pengangguran masih menjadi sebuah permasalahan ekonomi yang menyita pikiran pemerintah untuk segera dipecahkan. Krisis moneter yang terjadi di tahun 1998 menyebabkan semakin meningkatnya kemiskinan dan pengangguran. Berbagai cara, daya dan upaya telah diusahakan untuk mengatasinya salah satunya dengan mengembangkan usaha kecil dan menengah. Pemerintah Indonesia dengan sangat antusias bergerak untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah, karena pada saat krisis moneter tersebut sektor yang mampu bertahan dan tidak begitu parah terkena dampak dari krisis tersebut adalah sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), hal ini disebabkan karena UMKM telah terbiasa dengan kondisi pasar yang kompetitif sehingga mampu beradaptasi terhadap perubahan pergeseran, dan gejala lingkungan politik, sosial dan keamanan dan ekonomi makro (Abimanyu, Anggito et all, 2009:106) dalam Yudha Arisma (2010). Di saat usaha besar banyak berjatuhan dan kesulitan dalam menghadapi krisis sehingga terjadi kasus PHK besar-besaran, tetapi usaha kecil dan menengah malah mampu bertahan dari krisis tersebut.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 52,76 juta unit (BPS,2009). Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2009 juga menunjukkan

bahwa UMKM terbukti berkontribusi sebesar 56,92 % dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atau setara dengan Rp 1.213,25 Triliun. Selain itu, UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja sebesar 97,3 % dari total angkatan kerja yang bekerja dan memiliki jumlah yang besar dari total unit usaha di Indonesia (BI, 2011).

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa selain terbukti menjadi penyelamat perekonomian dalam masa krisis, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga mampu menciptakan dan memperluas lapangan atau peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Diharapkan, dengan berkembangnya sektor UMKM memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia, karena berkembangnya sektor UMKM berarti memperluas lapangan pekerjaan yang dapat menyerap pengangguran dan berdampak pada pengurangan kemiskinan. Selain itu, UMKM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat. Inilah yang mendorong pemerintah untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terbukti dengan ditetapkannya regulasi dan kebijakan dari sektor perbankan yang lebih ekspansif, khususnya pada alokasi kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-

Undang No.20 Tahun 2008 pada tanggal 4 Juli 2008 yang sebelumnya dikenal dengan sebutan alokasi Kredit Usaha Kecil (KUK) yang ketentuannya disempurnakan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3/2/PBI/2001 yang kemudian telah dicabut dan sudah tidak berlaku lagi. Selain itu Bank Indonesia juga menetapkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/39/PBI/2005 tentang pemberian bantuan teknis dalam rangka pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pemerintah membutuhkan dukungan dari sektor perbankan yang salah satu fungsinya adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit, khususnya kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), karena tanpa kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak akan dapat tumbuh dan berkembang.

Jumlah alokasi kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diberikan oleh bank umum yang notabene memiliki aset paling besar menjadi sangat berarti bagi berkembangnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Perkembangan, jumlah, dan penentu dari alokasi kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) oleh bank umum di Indonesia harus selalu diperhatikan. Perhatian kepadanya membutuhkan cara-cara khusus dan intensif sehingga selalu terpantau yaitu faktor-faktor dimana situasi dan kondisi yang menciptakan pengaruh hubungan antara alokasi kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang teralokasikan dengan sektor riil ekonomi UMKM.

Perkembangan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit kepada

UMKM. Setiap tahun kredit kepada UMKM mengalami pertumbuhan. Perkembangan dan kondisi kredit UMKM di Indonesia dari data yang diperoleh melalui Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia (SEKI) Bank Indonesia tahun 2007-2009, menunjukkan bahwa jumlah alokasi kredit UMKM menunjukkan jumlah yang terus meningkat setiap tahunnya. Jumlah besar dalam triliun rupiah diperlihatkan, pada tahun 2007 sebesar Rp 124 triliun, tahun 2008 sebesar Rp 142 triliun, dan tahun 2009 sebesar Rp 156 triliun.

Peningkatan terhadap alokasi kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tersebut menunjukkan bahwa sektor riil mulai mengalami pertumbuhan yang subur. Kondisi alokasi kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada bank umum di Indonesia dari tahun 2007-2009 dapat dilihat pada Tabel 1.1 dan Gambar 1.1 berikut ini :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Alokasi Kredit UMKM**  
**Bank Umum di Indonesia**

<b>Tahun</b>	<b>KUMKM (Milyard Rp)</b>
2007	124,428
2008	142,986
2009	156,361

**Sumber : SEKI BI, 2009**



**Gambar 1.1**  
**Grafik Jumlah Alokasi Kredit UMKM**

Peningkatan alokasi kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada bank-bank umum di Indonesia salah satunya disebabkan karena semakin meningkatnya penghimpunan dana dari masyarakat pada bank-bank umum (Sujati, 2007). Dari data yang diperoleh melalui SEKI BI, dana yang dihimpun dari masyarakat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2007 sebesar Rp 1.444 triliun, tahun 2008 sebesar Rp 1.656 triliun, dan pada tahun 2009 sebesar Rp 1.888 triliun. Peningkatan jumlah dana yang dihimpun bank akan mempengaruhi alokasi kredit karena jika semakin banyak dana yang diperoleh bank dari masyarakat maka akan semakin banyak pula yang dialokasikan untuk kredit karena bank ingin mendapatkan keuntungan yang besar.

Selain jumlah dana yang dihimpun, faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi alokasi kredit UMKM adalah suku bunga kredit, tingkat inflasi dan jumlah uang yang beredar (Saparuddin, 2010). Tingkat suku bunga kredit juga mempengaruhi kredit UMKM karena semakin tinggi tingkat suku bunga kredit maka akan menimbulkan keengganan masyarakat khususnya pelaku

UMKM untuk meminjam dana jika tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh UMKM dari peminjaman dana kredit UMKM tersebut. Inflasi juga berpengaruh terhadap kredit UMKM karena jika terjadi inflasi maka bank sentral (Bank Indonesia) akan menaikkan bunga kemudian berdampak pada kenaikan bunga oleh bank umum sehingga bunga kredit UMKM ikut naik. Jumlah uang beredar juga dapat mempengaruhi alokasi kredit UMKM karena apabila jumlah uang beredar terlalu banyak, maka ketersediaan dana bank akan semakin kecil sehingga jumlah yang dialokasikan untuk kredit juga akan semakin sedikit. Selain itu, banyaknya jumlah uang beredar juga akan menimbulkan peningkatan inflasi yang diikuti dengan peningkatan suku bunga kredit sehingga berdampak pada keengganan masyarakat (pelaku UMKM) untuk meminjam dana dari bank.

Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan atau mempengaruhi alokasi kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM dengan demikian layak untuk diteliti.

Penelitian Sujati (2007) yang meneliti tentang Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alokasi Kredit Usaha Kecil (KUK) pada Bank-Bank Umum di Indonesia (Pada tahun 2004:02-2005:12) menggunakan tiga variabel independen dalam mempengaruhi alokasi KUK yaitu jumlah dana dihimpun, suku bunga kredit, dan tingkat inflasi. Dalam penelitiannya tersebut, Sujati menyimpulkan bahwa jumlah dana dihimpun berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap alokasi KUK. Sedangkan tingkat suku bunga kredit dan tingkat inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi KUK.

Penelitian Saparuddin (2010) yang meneliti tentang Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alokasi Kredit Usaha Kecil (KUK) pada Bank-Bank Umum di Indonesia (Pada tahun 2008:1-2009:12) menggunakan empat variabel independen dalam mempengaruhi alokasi KUK yaitu jumlah dana dihimpun, suku bunga kredit, tingkat inflasi, dan jumlah uang beredar. Dalam penelitiannya tersebut, Saparuddin menyimpulkan bahwa jumlah dana dihimpun dan suku bunga kredit berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap alokasi KUK. Sedangkan tingkat inflasi dan jumlah uang beredar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi KUK.

Kedua penelitian di atas menggunakan data dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009. Untuk itu penulis ingin melakukan pembaharuan data dan penelitian yang sama kembali untuk mengetahui informasi yang lebih baru terkait penelitian yang hendak diteliti oleh penulis.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Saparuddin (2010). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada waktu. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini mengambil periode tiga tahun yaitu dari tahun 2010:1-2012:12. Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : “ **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alokasi Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Bank Umum di Indonesia**”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah peran dan upaya pemerintah dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia sudah optimal?
2. Apakah peran dan dukungan bank-bank umum dalam menyalurkan kredit kepada pelaku Usaha Mikro, Kredit, dan Menengah (UMKM) sudah optimal?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi alokasi kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada bank umum di Indonesia?
4. Apakah jumlah dana dihimpun, suku bunga kredit, tingkat inflasi, dan jumlah uang beredar berpengaruh terhadap alokasi kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada bank umum di Indonesia?

## 1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan untuk menghindari terjadinya pelebaran masalah yang diteliti, maka penelitian ini dibatasi pada faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada bank umum di Indonesia dari tahun 2010:1-2012:12.

## 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah jumlah dana dihimpun oleh bank umum di Indonesia berpengaruh terhadap alokasi kredit UMKM pada bank umum di Indonesia ?
2. Apakah suku bunga kredit berpengaruh terhadap alokasi kredit UMKM pada bank umum di Indonesia ?
3. Apakah tingkat inflasi di Indonesia berpengaruh terhadap alokasi kredit UMKM pada bank umum di Indonesia?
4. Apakah jumlah uang beredar berpengaruh terhadap alokasi kredit UMKM pada bank umum di Indonesia?
5. Apakah jumlah dana dihimpun, suku bunga kredit, tingkat inflasi, dan jumlah uang beredar berpengaruh secara simultan terhadap alokasi kredit UMKM pada bank umum di Indonesia?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah jumlah dana dihimpun oleh bank umum di Indonesia berpengaruh terhadap alokasi kredit UMKM pada bank umum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah suku bunga kredit berpengaruh terhadap alokasi kredit UMKM pada bank umum di Indonesia.
3. Untuk mengetahui apakah tingkat inflasi di Indonesia berpengaruh terhadap alokasi kredit UMKM pada bank umum di Indonesia.
4. Untuk mengetahui apakah jumlah uang beredar berpengaruh terhadap alokasi kredit UMKM pada bank umum di Indonesia.

5. Untuk mengetahui apakah jumlah dana dihimpun, suku bunga kredit, tingkat inflasi, dan jumlah uang beredar berpengaruh secara simultan terhadap alokasi kredit UMKM pada bank umum di Indonesia.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

1. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi kredit UMKM pada bank umum di Indonesia.
2. Bagi pemerintah dan masyarakat, untuk informasi bagi pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan UMKM.
3. Bagi bank umum di Indonesia, sebagai referensi dan informasi dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan alokasi kredit UMKM serta strategi peningkatan UMKM.
4. Bagi akademisi, sebagai sumber informasi atau bahan masukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian objek yang sejenis di masa yang akan datang.